

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada SMA Negeri 8 Manado

Reuni A. M. Sitorus¹, Abdul R. Dilapanga², Fitri H. Mamonto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ sallyyutris.thomas@gmail.com, ² abduhrahmandilapanga@unima.ac.id, ³ fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Policy Implementation
Independent Learning
Curriculum
Pancasila Student
Profile

The purpose of this research is to describe, analyze, and interpret the effectiveness of the implementation of the Merdeka Learning Curriculum policy at SMA Negeri 8 Manado. This research uses a qualitative research type with a descriptive qualitative approach. The results show that the implementation of the Merdeka Learning Curriculum policy at SMA Negeri 8 Manado has been carried out effectively and well, because: 1) The implementation of the Merdeka Learning Curriculum policy has involved all school components; 2) The design of the operational curriculum for SMA Negeri 8 Manado has been progressing well, involving all components within the school environment with each taking on their respective roles and responsibilities; 3) Various P5 activities with a variety of themes that have been carried out can enhance students' self-confidence, independence, cooperation, togetherness, global diversity, creativity, and responsibility, although it is acknowledged that there are still challenges faced; 4) The guidance on students' interests and talents has been well implemented according to needs; and 5) Supporting factors include the high frequency of socialization, the empowerment of learning communities, activation of MGMP activities according to subject clusters, involvement of BBPMP, BBGP, and local government stakeholders, while the inhibiting factor lies in the need for further improvement in the provision of infrastructure and facilities.

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan
Kurikulum Merdeka
Belajar
Profil Pelajar Pancasila

INTISARI

Diterima : 25-11-2024
Dipublish : 2-12-2024

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan efektifitas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif, karena : 1) Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar sudah melibatkan semua komponen sekolah; 2) Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado sudah berjalan dengan baik, melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing; 3) Berbagai kegiatan P5 dengan ragam tema yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, kemandirian, gotong royong, kebersamaan, kebhinnekaan global, kreativitas dan tanggung jawab, meskipun diakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi; 4) Pendampingan minat dan bakat siswa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan; dan 5) Factor pendukung yaitu frekuensi sosialisasi yang begitu intens, pemberdayaan komunitas belajar, pengaktifan kegiatan MGMP sesuai rumpun bidang studi, keterlibatan BBPMP, BBGP dan stakeholder

* Korespondensi Penulis. e-mail: reunisitorus66@gmail.com

* DOI : 10.53682/administro.v6i2.10615

pemerintah daerah, sedangkan factor yang menghambat dari sisi penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi.

Copyright © 2024 (Reuni A. M. Sitorus). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Kurikulum merdeka belajar dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Kurikulum merdeka belajar berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan Peserta Didik, namun dengan tetap mengakui otoritas Pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar Peserta Didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya [1].

Kurikulum Merdeka, diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021, menggunakan terminologi baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas makna dan konsep dalam kurikulum, serta memudahkan implementasinya di lapangan. Landasan terminologi kurikulum merdeka belajar mengacu pada definisi dan konsep kunci yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, konsep kunci tersebut antara lain: 1) Capaian Pembelajaran (CP) yaitu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. CP tidak lagi hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, karakter, dan sikap. 2) Profil Pelajar

Pancasila (PPP) yaitu Gambaran karakteristik ideal peserta didik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. 3) Asesmen yaitu Proses pengukuran dan evaluasi pencapaian pembelajaran peserta didik. Asesmen dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya dilakukan melalui tes, tetapi juga melalui berbagai metode penilaian lainnya, seperti observasi, portofolio, dan proyek. 4) Pembelajaran Berdiferensiasi (PdB) yaitu Strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. 5) Modul Ajar yaitu Satuan rencana pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Modul ajar dalam Kurikulum Merdeka dirancang dengan lebih fleksibel dan terbuka, sehingga memungkinkan guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. 6) Asesmen Nasional (AN) yaitu Penilaian yang dilakukan oleh Badan Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSNP) untuk mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional. AN dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek literasi, numerasi, dan karakter [2].

Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya didasarkan pada filosofi yang kuat, tetapi juga ditopang oleh landasan empiris yang kokoh. Penelitian dan kajian mendalam menjadi landasan utama dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Kajian ini dilakukan baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan untuk memahami kebutuhan peserta didik di Indonesia, mempelajari praktik terbaik implementasi kurikulum di berbagai negara, membuktikan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi, memperkuat profil pelajar Pancasila, dan mengevaluasi hasil asesmen nasional [3].

Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek

melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi). Hal inilah yang menjadi salah satu landasan empiris yang menjadi dasar penerapan kurikulum merdeka belajar [4].

Implementasi dari Kurikulum Merdeka secara umum dimaksudkan untuk mendalami minat dan bakat peserta didik sesuai dengan keinginannya yang lebih difokuskan pada implementasi baik dalam bentuk budaya sekolah maupun KBM untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila [5]. Menurut Aisyah dkk, Perencanaan untuk implementasi Kurikulum Merdeka itu terdiri dari perancangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), perancangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), perencanaan pembelajaran dan asesmen, penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, dan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila [6].

Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari Balai Guru Penggerak (BGP) tahun 2024 tercatat ada 230 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Sulawesi Utara dimana seluruh sekolah sudah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dengan 3 opsi yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.

Pada observasi awal kebijakan kurikulum merdeka belajar telah diterapkan di SMA Negeri 8 Manado setelah sekolah tersebut terpilih sebagai Sekolah Penggerak pada tahun 2021. Di sekolah tersebut juga sudah melakukan perencanaan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu perancangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), perancangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), perencanaan pembelajaran dan asesmen, penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, dan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun masih ada guru yang masih kebingungan untuk menjalankan pembelajaran sesuai rancangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan pendampingan minat-bakat siswa. Pada saat pembelajaran guru masih terasa kaku dengan adanya kurikulum merdeka belajar, masih banyak guru yang kurang mendapat pelatihan khusus untuk kurikulum merdeka belajar dan siswa juga masih kurang dapat memahami pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar serta proyek pada kurikulum merdeka belajar juga masih membingungkan siswa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dalam proses perancangan kurikulum, perencanaan proyek

penguatan profil pelajar Pancasila, pendampingan minat bakat serta factor penghambat dan faktor pendukung implementasi kurikulum merdeka belajar, melalui penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMA Negeri 8 Manado".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana dalam penelitiannya melalui penyelidikan keadaan atau kondisi yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang secara langsung atau pelaku yang dapat diamati [7]. Peneliti menyelidiki proses penerapan implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado lewat wawancara, observasi dan dokumentasi yang hasilnya akan di deskripsikan berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terdapat di lapangan, dengan tujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang ada sehingga diharapkan mampu untuk menggambarkan realisasi dari kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menggambarkan realisasi dari kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek Implementasi Kurikulum Merdeka

Mengacu pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dan hasil wawancara dan diskusi berbagai informan yang telah dianalisis dan ditelaah, maka implementasi kurikulum merdeka belajar sudah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan semua komponen sekolah, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa, sehingga siswa dapat menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya, terbentuknya sikap kemandirian dan tanggung jawab melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah terutama kegiatan beberapa kegiatan P5 yang dialami siswa. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa semua warga sekolah mengambil peran dan tanggung jawab masing sesuai dengan kapasitasnya, sehingga kesuksesan IKM ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan semua pihak.

Sejalan dengan konsep dasar implementasi kebijakan oleh Nugroho, bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan sebagai aplikatif sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, sehingga dalam implementasinya dimaknai dari dua langkah atau tahapan yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan. Dipertegas pula Van Meter and Van Horn, menyatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum

atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya [8].

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Manado merupakan langkah strategis dalam konteks kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Teori kebijakan publik, khususnya model implementasi, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat sekolah. Di SMA Negeri 8 Manado, beberapa faktor kunci berperan dalam keberhasilan implementasi, termasuk dukungan dari pihak manajemen sekolah, pelatihan bagi guru, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana komunikasi antar pemangku kepentingan—seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, dan tenaga pengajar—mempengaruhi proses implementasi dan efektivitas kurikulum.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Manado juga mencerminkan dinamika kebijakan publik yang kompleks. Misalnya, meskipun ada semangat untuk menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada potensi siswa, kendala terkait sumber daya, infrastruktur, dan pemahaman guru tentang kurikulum baru sering kali menjadi penghambat. Dengan menerapkan teori kebijakan publik, kita dapat menganalisis respons terhadap tantangan ini serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga terintegrasi secara efektif dalam praktik sehari-hari di kelas. Melalui evaluasi dan umpan balik yang terus-menerus, SMA Negeri 8 Manado dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Manado. Edward III menekankan pentingnya faktor-faktor seperti sumber daya, pengaturan organisasi, komunikasi, dan sikap para pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks [9]. Kurikulum Merdeka, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti pelatihan guru dan materi ajar yang sesuai. Jika SMA Negeri 8 Manado dapat memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang kuat tentang kurikulum baru dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, maka proses implementasi akan lebih lancar dan efektif.

Di sisi lain, Thomas Dye dalam teorinya menekankan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Konsep masalah dan solusi menjadi pusat perhatian dalam kebijakan

public [9]. Dalam konteks ini, penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Manado dapat dipandang sebagai respons terhadap tantangan pendidikan yang dihadapi, seperti kebutuhan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan mengembangkan keterampilan siswa di era modern. Dengan demikian, integrasi teori Edward III dan konsep Dye memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, serta bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkorelasi pada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka ini dari Maruba dkk, yang berorientasi pada implementasi Kurikulum merdeka belajar di Sekolah Penggerak (Studi di SMA Negeri 1 Kabanjahe) yang menyimpulkan bahwa : (1) Dalam proses perencanaan kurikulum, seluruh elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru, hingga peserta didik mampu beradaptasi dan menaruh minat dalam pengenalan tentang kurikulum merdeka belajar (2) Melalui musyawarah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru saling berkolaborasi dalam menyusun pengorganisasian kurikulum merdeka belajar. Mulai dari jadwal pembelajaran, modul ajar, metode ajar, hingga hal-hal pendukung lainnya disusun dengan beragam penyesuaian berdasarkan hasil diskusi. (3) Terdapat banyak perubahan signifikan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, di antaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi dalam digitalisasi pendidikan, fleksibilitas dalam belajar, dan metode belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Terdapat tantangan dan kekurangan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar, walaupun demikian hal tersebut dapat diatasi dan senantiasa berusaha ditingkatkan penerapannya dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe [10]. Hal tersebut dapat dilakukan karena kurikulum merdeka belajar dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan global di era sekarang. Kondisi tersebut dapat pula dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan dari seluruh stakeholder yang ada dalam komunitas sekolah SMAN 8 Manado, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai.

3.2 Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado sudah berjalan dengan baik, melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing, termasuk didalamnya pengembangan bahan ajar kurikulum merdeka yang terupdate bersifat kekinian, kegiatan IHT, Komunitas belajar yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan dapat dirasakan langsung siswa dalam meningkatkan

sikap dan perilaku profil Pancasila dimanapun berada. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa penyusunan KOSP telah berjalan dengan baik, melalui tahapan yang dipersyaratkan IKM tersebut.

Sejalan dengan konsep implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan tahapan proses implementasi, antara lain: 1) *Tractability of the problem* (risalah rentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan); 2) *Ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tepat); 3) *Non-Statutory variabels affecting implementation* (variabel-variabel diluar kebijakan/peraturan perundangan telah mempengaruhi implementasinya). Artinya, variabel ini turut serta mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka sebagai perangkat pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado.

Dipertegas pula dengan hasil penelitian yang relevan oleh Hasibuan et al., yang menitikberatkan pada Salah satunya dengan memahami buku ajar guru. Kurikulum merdeka belajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat belajar peserta didik, seperti telah ditiadakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan munculnya Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada peserta didik. Terdapat pengintegrasian P5 di setiap mata pelajaran. Dan adanya perbedaan mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, IPAS dan SBdP. Serta pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yang dilakukan guru dengan menggunakan pembelajaran media literasi digital. Dengan demikian, pentingnya pelaksanaan kurikulum merdeka belajar bagi guru dan siswa yang diterapkan di sekolah penggerak [11].

Diperkuat pula hasil penelitian Fauzi, bahwa Langkah-langkah SMAN 1 Pengaron, dalam upaya mengimplentasikan kurikulum merdeka belajar diantaranya adalah, (1) Membentuk komite pembelajaran. Komite tersebut adalah suatu tim di tingkat satuan pendidikan. (2) Mengadakan *In House Training* (IHT) untuk mengenal lebih dalam tentang kurikulum merdeka belajar di sekolah. (3) Merumuskan visi dan misi serta tujuan sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. (4) Mengadakan rapat dengan tim pengembang kurikulum. (5) Menelaah dan menggunakan panduan serta pedoman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (6) Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan fasilitator sekolah penggerak serta pengawas Pembina [12].

Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

(KOSP) di SMA Negeri 8 Manado mencerminkan penerapan teori kebijakan publik yang berfokus pada pengembangan pendidikan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Teori kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks KOSP, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, seperti komitmen manajemen sekolah, pelatihan guru, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini diharapkan dapat terintegrasi secara efektif dalam proses pembelajaran di kelas.

Selain itu, dalam analisis kebijakan publik, penting untuk mempertimbangkan aspek umpan balik dan evaluasi. Implementasi KOSP di SMA Negeri 8 Manado harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pengumpulan data mengenai hasil belajar siswa, serta umpan balik dari guru dan orang tua, menjadi krusial dalam proses ini. Melalui evaluasi yang sistematis, sekolah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, penerapan KOSP tidak hanya menjadi langkah formal, tetapi juga sebuah proses dinamis yang mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manado.

Teori Richard Rose pada Tahun 1993 tentang implementasi kebijakan publik [13] menawarkan perspektif yang relevan dalam menganalisis penerapan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) di SMA Negeri 8 Manado. Rose menekankan pentingnya konteks lokal dan partisipasi aktor-aktor di dalamnya dalam proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, keberhasilan KOSP sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan kebijakan nasional tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif.

Sementara itu, teori implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin pada Tahun 1986 menyoroti bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan organisasi. Mereka berargumen bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan dan dilaksanakan di lapangan [14]. Dalam konteks KOSP di SMA Negeri 8 Manado, hal ini berarti bahwa meskipun kurikulum telah ditetapkan secara formal, faktor-faktor seperti komitmen dan kualitas

pelatihan guru, serta dukungan dari manajemen sekolah, sangat berpengaruh pada bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan di kelas. Oleh karena itu, sinergi antara teori Rose dan Ripley-Franklin membantu memahami dinamika implementasi KOSP, di mana konteks lokal dan interaksi antar aktor menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

3.3 Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Kondisi kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan P5 dengan ragam tema yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, kemandirian, gotong royong, kebersamaan, kebhinnekaan global, kreativitas dan tanggung jawab, meskipun diakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi dari sisi pembagian waktu antar guru bidang studi, pembiayaan yang digunakan, peningkatan kualitas kompetensi guru dalam menemukan ide terbaru kegiatan P5 berbasis IT, dan kolaborasi antar komite sekolah yang harus ditingkatkan lagi. Artinya, pihak sekolah sudah berusaha maksimal untuk menyukseskan kegiatan P5 ini dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah termasuk partisipasi aktif orang tua siswa dalam mendorong anaknya untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan ini.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Diah Ayu Saraswati dkk, bahwa Dalam penerapan kurikulum merdeka, siswa dituntut untuk membuat atau melaksanakan suatu projek. Kegiatan projek pada kurikulum merdeka ini yaitu salah satunya dengan melaksanakan kegiatan P5. Kegiatan P5 merupakan suatu kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 yang dilakukan disesuaikan dengan 7 tema yang diatur oleh Kemendikbud Dikti. Hasil projek yang akan ditampilkan pada kegiatan P5 ini yaitu (1) Poster (2) Tarian (3) Musikalisasi puisi (4) Teater (5) Vlog (6) Berjualan. SMAN 4 Kota Tangerang termasuk sekolah penggerak dengan guru penggerak, yang menjadikan pembelajaran terdiferensiasi sebagai salah satu strategi pada modul program guru penggerak. Dalam pembelajaran biologi pada kurikulum merdeka ini, hanya terdiri dari 2 pokok bahasan yaitu virus dan keanekaragaman hayati. Dalam proses pembelajarannya, guru biologi kelas X menggunakan model pembelajaran yaitu *Blended Learning*. [15]

3.4 Minat dan Bakat Belajar Siswa

Adapun hasil pendampingan minat dan bakat siswa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan hasil pemetaan minat dan bakat siswa, terjadi perubahan sikap dan perilaku positif bagi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya, ada kepuasan siswa mengekspresikan minat dan bakatnya dalam

beberapa lomba, even atau kompetisi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, ada umpan balik yang positif dari komite sekolah dan orang tua siswa serta adanya partisipasi dukungan material maupun non material, meskipun pengaturan jadwal siswa menjadi tantangan untuk mengikuti berbagai kegiatan tambahan tersebut, penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dan keterlibatan pelatih, instruktur, pembina dari pihak luar termasuk mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan minat dan bakat siswa.

Didukung pula hasil penelitian Hasibuan dkk, bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak SDN 104231 Sugiharjo telah dilaksanakan di kelas 1 dan 4 dengan optimal dan sedang berlangsung [11]. Implementasi kurikulum merdeka belajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat belajar peserta didik, seperti telah ditiadakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan munculnya Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada peserta didik. Terdapat pengintegrasian P5 di setiap mata pelajaran. Dan adanya perbedaan mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, IPAS dan SBdP. Serta pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yang dilakukan dengan menggunakan pembelajaran media literasi digital. Dengan demikian, pentingnya pelaksanaan kurikulum merdeka belajar bagi guru dan siswa yang diterapkan di sekolah penggerak.

Implementasi kebijakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat belajar siswa di SMA Negeri 8 Manado dapat dianalisis melalui lensa teori kebijakan publik. Teori ini menekankan pentingnya identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pengembangan program yang mendukung minat dan bakat siswa—seperti ekstrakurikuler dan program berbasis kompetensi—merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan manajemen sekolah, pelatihan bagi guru, dan partisipasi aktif dari orang tua serta masyarakat.

Selanjutnya, pentingnya evaluasi dalam teori kebijakan publik juga menjadi kunci dalam implementasi program minat dan bakat. SMA Negeri 8 Manado perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap perkembangan siswa. Pengumpulan data tentang pencapaian akademik dan non-akademik siswa, serta umpan balik dari siswa dan orang tua, dapat memberikan wawasan yang berharga. Dengan demikian, sekolah dapat melakukan penyesuaian dan pengembangan program lebih lanjut, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya relevan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan potensi setiap siswa secara optimal.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrative tertentu dengan mobilisasi dana dan sumberdaya yang ada [16]. Implementasi kebijakan adalah bagian terpenting dari kebijakan itu sendiri. Karena melalui implementasi, kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Tahap implementasi sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang kritis [17]. Sejalan dengan konsep dasar implementasi kebijakan oleh Nugroho bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan sebagai aplikatif sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, sehingga dalam implementasinya dimaknai dari dua langkah atau tahapan yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan [18]. Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dipertegas pula Van Meter and Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya [8]. Dalam konteks pengembangan minat dan bakat belajar siswa di SMA Negeri 8 Manado, teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada sejumlah variabel, seperti karakteristik kebijakan, konteks sosial dan politik, serta kemampuan dan komitmen para pelaksana. Dengan memahami aspek-aspek ini, manajemen sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan kebijakan yang efektif dalam pengembangan minat dan bakat siswa.

Sementara itu, Merilee S. Grindle menyoroti pentingnya konteks dan proses dalam implementasi kebijakan. Grindle berpendapat bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh para pemangku kepentingan [19]. Di SMA Negeri 8 Manado, hal ini berarti bahwa keterlibatan guru, siswa, dan orang tua dalam merumuskan dan melaksanakan program pengembangan minat dan bakat sangat penting. Jika semua pihak terkait merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam kebijakan tersebut, maka kemungkinan keberhasilan implementasi akan meningkat. Dengan demikian, sinergi antara teori Van Meter dan Van Horn serta pemikiran Grindle membantu menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat

Berkaitan dengan factor yang mendukung dan menghambat IKM ini, maka dapat disimpulkan bahwa factor pendukung yaitu frekuensi sosialisasi yang begitu intens, pemberdayaan komunitas belajar, pengaktifan kegiatan MGMP sesuai rumpun bidang studi, keterlibatan BPMP, BGP dan stakeholder pemerintah daerah, sedangkan factor yang menghambat dari sisi penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi, kesiapan diri siswa yang masih perlu penyesuaian diri dan pelibatan pihak ketiga yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam keikutsertaannya meningkatkan kualitas IKM ini.

Diperjelas pula teori dari Grindle, bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*) [19]. Artinya variabel ini sangat berkaitan dengan kepentingan tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu faktor atau variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktifitas administrasi dilaksanakan sesuai sumber daya dukungan yang dimilikinya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Sejalan dengan konsepsi dasar implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yang terdiri dari: 1) standar/ukuran dan sasaran kebijakan; 2) sumber-sumber daya; 3) karakteristik/sifat implementor kebijakan (badan/instansi/pelaksana); 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana; 5) sikap para pelaksana; 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik [9]. Artinya, keenam variable tersebut dapat pula mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kurikulum merdeka secara massif dan komprehensif pada SMAN 8 Manado.

4. Kesimpulan

Merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif, karena :

1. Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar sudah melibatkan semua komponen sekolah, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa, sehingga siswa dapat menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya, terbentuknya sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa.
2. Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado sudah berjalan

- dengan baik, melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing, termasuk didalamnya pengembangan bahan ajar kurikulum merdeka yang terupdate bersifat kekinian, IHT, Komunitas belajar dan sudah sesuai tahapan yang dipersyaratkan IKM tersebut.
3. Berbagai kegiatan P5 dengan ragam tema yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, kemandirian, gotong royong, kebersamaan, kebhinnekaan global, kreativitas dan tanggung jawab, meskipun diakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi dari sisi pembagian waktu antar guru bidang studi, pembiayaan yang digunakan, peningkatan kualitas kompetensi guru dalam menemukan ide terbaru kegiatan P5 berbasis IT, dan kolaborasi antar komite sekolah yang harus ditingkatkan lagi.
 4. Pendampingan minat dan bakat siswa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan hasil pemetaan minat dan bakat siswa, terjadi perubahan sikap dan perilaku positif bagi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya, ada kepuasan siswa mengekspresikan minat dan bakatnya dalam beberapa lomba, even atau kompetisi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
 5. Factor pendukung yaitu frekuensi sosialisasi yang begitu intens, pemberdayaan komunitas belajar, pengaktifan kegiatan MGMP sesuai rumpun bidang studi, keterlibatan BBPMP, BBGP dan stakeholder pemerintah daerah, sedangkan factor yang menghambat dari sisi penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi, kesiapan diri siswa yang masih perlu penyesuaian diri dan pelibatan pihak ketiga yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam keikutsertaannya meningkatkan kualitas IKM ini.
- ### Referensi
- [1] Pemerintah Pusat, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024>
 - [2] Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Panduan Asesmen Nasional Jenjang SMP dan SMA," *KEMENDIKBUD*, 2022. https://repositori.kemdikbud.go.id/25488/1/Buku_Panduan_Capaian_Hasil_AN.pdf
 - [3] Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kurikulum Merdeka : Panduan Implementasi," *KEMENDIKBUD*, 2021. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf
 - [4] D. Rahmadayanti and A. Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 4, 2022, doi: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>.
 - [5] I. Azzahra, A. Nurhasanah, and E. Hermawati, "Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran IPAS di SDN 4 Purwawinangun," *Didakt. J. Ilm. PGSD STKIP Subang*, vol. 9, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1270>.
 - [6] D. Aisyah *et al.*, "Analisis Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Kuin Utara 6," *MARASJurnal Penelit. Multidisplin*, vol. 2, no. 3, pp. 1166–1174, 2024, doi: <https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.346>.
 - [7] N. Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan : Teori-teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
 - [8] A. R. Dilapanga, L. Bulu, and J. Mantiri, *Kebijakan Publik*. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2024.
 - [9] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. 2017. doi: 10.1017/S0033291702006190.
 - [10] M. Purba, F. R. Dongoran, and S. Aktar, "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (Studi di Sma Negeri 1 Kabanjahe)," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 5, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5005>
 - [11] A. R. H. Hasibuan, L. K. Aufa., W. A. Siregar., and H. Adha, "Implementasi Kurikulum merdeka belajar di Sekolah Penggerak SDN 104231 Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 6, 2022, doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9513>.
 - [12] A. Fauzi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak (Studi Kasus Pada SMAN 1 Pengaron Kabupaten Banjar)," *J. Ilmu Pendidik. Sos. Budaya*, vol. 18, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>.
 - [13] Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses, dan Studi Kasus*. 2007.
 - [14] R. B. Ripley and G. A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press, 18986.
 - [15] D. A. Saraswati *et al.*, "Analisis Kegiatan

- P5 di SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebagai Penerapan Pembelajaran Terdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka,” *J. Pendidik. MIPA*, vol. 12, no. 2, pp. 185–191, 2022, doi: <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i.>
- [16] R. A. Alhasni, F. H. Mamonto, and N. M. Onibala, *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Manado: Tahta Media Group, 2024. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/574>
- [17] A. R. Dilapanga, J. Mantiri, and M. I. R. Rantung, “Implementation of Village Administration Policies in Panasen Village, Kakas Barat District, Minahasa Regency,” *Atl. Press*, 2023, doi: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_215.
- [18] A. R. Dilapanga and M. I. R. Rantung, *Monitoring & Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- [19] M. S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).